

# PERANAN OPINION LEADER DALAM KELUARGA BERENCANA

( Suatu Study Deskriptif Peranan Pemuka Agama Dalam Mendukung Keberhasilan KB di Kelurahan Baringin Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan )

SKRIPSI

OLEH

MASLIANA MIRAWATI

NIM : 96.850.0001

PROGRAM STUDI KOMUNIKASI



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2000

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)7/8/24

LEMBARAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PERANAN OPINION LEADER DALAM KELUARGA BERENCANA( Suatu Study Deskriptif Peranan Pemuka Agama Dalam Mendukung Keberhasilan KB di Kelurahan Baringin Kecamatan Sapiro Kabupaten Tapanuli Selatan)

Nama Mahasiswa : MASLIANA MIRAWATI

NPM : 96 850 0001

Program Studi : KOMUNIKASI

Menyetujui  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

( Drs. Hottob Harahap )

( Dra. Effiati Juliana Hsb )

Mengetahui :

Ketua Jurusan

D e k a n

( Dra. Effiati Juliana Hsb )

( Drs. Heri Kusmanto, MA.)

Tanggal Lulus : .....

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## **ABSTRAKSI**

### **PERANAN OPINION LEADER DALAM KELUARGA BERENCANA**

( Suatu Study Deskriptif Peranan Pemuka Agama Dalam Mendukung Keberhasilan KB di Kelurahan Baringin Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan) **O L E H**

**MASLIANA MIRAWATI**

**NIM : 96.850.0001**

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI**

Program Keluarga Berencana dipandang sebagai sebuah sarana dalam mencari pemecahan persoalan di atas. Pada dasarnya gerakan KB sudah ada di Indonesia sejak tahun 1955, akan tetapi baru pada tahun 1970 menjadi program pemerintah.

Di sisi lain masyarakat desa yang tradisional dengan keterbatasannya cenderung hanya mempercayai informasi maupun pesan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat. Karena keterbatasan dalam banyak hal disertai sikap yang sederhana serta kekeluargaan, biasanya informasi dan komunikasi di desa itu berlaku secara langsung atau tatap muka.

Secara umum komunikasi merupakan kebutuhan sosial yang mutlak, merupakan alat yang memiliki potensi yang meningkatkan pengetahuan dan pedoman kemajuan suatu kebudayaan. Masyarakat dalam batas unit sosial kecil dengan komunikasi tatap muka merupakan bentuk pokok hubungan sosial.

Secara khusus di dalam menjalankan program KB ditingkat pedesaan ditemukan banyak permasalahan, yang salah satunya adalah adat budaya yang hidup di pedesaan tersebut. Program KB dihadapkan pada permasalahan tersebut.

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)7/8/24

Atau dengan kata lain bahwa Program KB akan menampilkan sesuatu yang selama ini dikenal di sebuah pedesaan yaitu banyak anak banyak rezeki sedang KB berusaha membatasi jumlah anak.

Di satu sisi opinion leader serta kondisi opinion leader di daerah pedesaan seperti di Kelurahan Baringin Kecamatan Sipirok ini dipegang oleh pengetua-pengetua adat, orang yang dituakan serta tokoh alim ulama. Pengejawantahan hal-hal yang baru akan sangat berhubungan dengan orang-orang yang disebutkan sebagai opinion leader tersebut. Termasuk halnya di dalam pelaksanaan program KB yang sangat ditentukan oleh opinion leader tersebut, baik itu kaum alim ulama, cerdik pandai maupun pengetua-pengetua adat.

Dalam pembahasan skripsi ini diajukan rumusan masalah sebagai berikut “ Apakah pemuka agama berperan dalam mendukung keberhasilan program-KB di kelurahan Baringin Kecamatan Sipirok “.

Setelah dilakukan penelitian baik secara kepustakaan dan lapangan maka didapatkan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui sebaran angket maka didapatkan suatu keadaan terdapat hubungan peranan pemuka agama dengan keberhasilan KB di Kelurahan Baringin Kecamatan Sipirok, dimana dari sebaran angket yang dilakukan maka pada dasarnya kedudukan pemuka agama sangat berperan sekali dalam mensukseskan berjalannya program keluarga berencana, baik itu melalui informasi yang diberikannya maupun melihat keterlibatan pemuka agama itu sendiri di dalam pelaksanaan program keluarga berencana, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden pada tabel 20.

Pelaksanaan program keluarga berencana tidak dapat dilakukan secara sendiri oleh instansi pemerintahan tetapi harus melibatkan semua unsur yang ada di dalam lokasi kerja pelayanan keluarga berencana baik itu dengan unsur kepala kelurahan setempat maupun dengan pengetua-pengetua adatnya, kaum alim ulama serta orang-orang yang dihormati pada suatu daerah, sebagaimana jawaban responden di dalam tabel 10.

Peranan opinion leader baik yang formal maupun yang informal telah berhasil menggerakkan partisipasi masyarakat dalam ber-KB. Ini terbukti dengan ikut sertanya masyarakat dalam menghadiri pertemuan-pertemuan tentang program keluarga berencana yang dicerminkan dari tanggapan responden yang positif terhadap penyebaran angket yang dilakukan pada tabel 16.

Tingkat keterlibatan responden atau masyarakat sebagai objek pelaksanaan program KB dalam berkomunikasi antar personal di dalam pelaksanaan program KB ternyata cukup tinggi. Ini terbukti meningkatnya keberhasilan KB, baik itu dari peningkatan jumlah akseptor maupun juga bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang program keluarga berencana itu sendiri hal ini dapat dilihat dalam tabel 22.

## KATA PENGANTAR

Pada kesempatan yang pertama ini penulis mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, karena atas berkah dan rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Komunikasi untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah " Peranan Opinion Leader Dalam Keluarga Berencana (Suatu Studi Deskriptif Peranan Pemuka Agama Dalam Mendukung Keberhasilan KB di Kelurahan Baringin Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan ".

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak Drs. Heri Kusmano, MA, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area .
- Ibu Dra. Effiati Juliana Hasibuan selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area dan sekaligus sebagai Dosen Pembimbing II penulis.

- Bapak Drs. Hottob Harahap, selaku Dosen Pembimbing I penulis,
- Bapak Kepala Lurah Baringin Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan beserta seluruh unsur stafnya dimana penulis mengadakan penelitian.
- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf administrasi Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Penulis juga mengucapkan rasa terima-kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda J. Lubis dan Ibunda L. Gultom, bagi keduanya bakti dan doa penulis. Juga kepada Abangda B. Siregar tercinta yang telah memberikan dorongan tersendiri kepada penulis sehingga akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan. Demikianlah dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Agustus 2000

Penulis

**Masliana Mirawati**  
NPM : 96.850.0001

## DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAKSI	
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	vii
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Pembatasan Masalah .....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
E. Kerangka Pemikiran .....	5
BAB II. URAIAN TEORITIS .....	10
A. Pengertian dan Proses Komunikasi .....	10
B. Pengertian Opinion Leader .....	15
C. Pengertian dan Sejarah Keluarga Berencana .....	18
D. Metode Keluarga Berencana .....	21
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN .....	26
A. Populasi dan Sampel .....	26
B. Metode Pengumpulan Data .....	26
C. Variabel dan Definisi Operasional .....	27

	D. Teknik Analisis Data .....	30
BAB IV.	DESKRIPTIF LOKASI PENELITIAN .....	31
	A. Gambaran Singkat tentang Kelurahan Baringin Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan .....	31
	B. Pasangan Usia Subur .....	36
	C. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Baringin Dan Uraian Tugas .....	37
BAB V.	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	43
	A. Jalannya Penelitian .....	43
	B. Teknik Pengolahan Data .....	43
	C. Analisa Data .....	44
BAB VI.	KESIMPULAN DAN SARAN .....	62
	A. Kesimpulan .....	62
	B. Saran-Saran .....	63
DAFTAR PUSTAKA	.....	64

## DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Komposisi Penduduk Menurut Umur (Keadaan Akhir Desember 1999)	34
2. Penduduk Tiap Dusun (Akhir Desember 1999) .....	35
3. Penduduk Menurut Agama (akhir Desember 1999) .....	35
4. Pasangan Usia Subur (PUS) (Keadaan Akhir Tahun 1999) .....	36
5. Peserta KB Tahun 1999 .....	37
6. Responden Menurut Umur .....	45
7. Tingkat Pendidikan Responden .....	46
8. Responden Menurut Pekerjaan .....	47
9. Pengertian responden Tentang KB .....	48
10. Jalur Informasi Tentang KB .....	49
11. Sumber Yang Banyak Memberikan Keterangan KB .....	50
12. Jenjang Mutu Informasi .....	51
13. Frekuensi Responden Menghadiri Pertemuan KB .....	52
14. Tingkat Keyakinan Responden Terhadap Pemberi Penerangan KB .....	53
15. Tingkat Pelaksanaan Aturan-Aturan KB Oleh Responden .....	54
16. Tingkat Kegiatan Akseptor Dalam Memasyarakatkan KB .....	55
17. Frekuensi Peran Serta Membantu Penginformasian KB .....	55
18. Frekuensi Mendengarkan Informasi Tambahan Tentang KB dari Media Massa .....	56
19. Pilihan media Komunikasi Massa Sebagai Sumber Informasi Tambahan .	57

20. Tingkat Peran Serta Pemuka Agama .....	58
21. Pendapat Responden Terhadap Peranan Pemuka Agama .....	59
22. Dukungan Responden Dalam Usaha Mencapai Tujuan KB .....	60
23. Motivasi Responden Menjadi Akseptor KB .....	61



## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Baringin .....	42



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai salah satu negara yang pertumbuhan penduduknya demikian besar, Indonesia dihadapkan pada suatu keadaan bahwa pertumbuhan penduduk yang besar tersebut tidak diikuti dengan peningkatan perekonomian yang besar pula.

Hal ini merupakan suatu kendala dalam mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan makmur, sehingga perlu dilakukan usaha-usaha pengurangan jumlah pertumbuhan penduduk di masa mendatang, sehingga dapat dicapai kesesuaian pertumbuhan penduduk dengan pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

Program Keluarga Berencana dipandang sebagai sebuah sarana dalam mencari pemecahan persoalan di atas. Pada dasarnya gerakan KB sudah ada di Indonesia sejak tahun 1955, akan tetapi baru pada tahun 1970 menjadi program pemerintah.

Sebagai suatu program kebijaksanaan pemerintah maka pada dasarnya program keluarga berencana hanya dapat dianjurkan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk dapat mengikutinya. Keseriusan pemerintah perihal terlaksananya program KB ini dapat dilihat dengan terbentuknya sebuah badan yang bernama Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, yang dalam pelaksanaan kerjanya terdapat pada semua daerah tingkat II di Indonesia.

Tercapainya maksud dan tujuan dari pelaksanaan program keluarga berencana tidak hanya ditentukan oleh kedudukan dari aparatur pemerintahan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)7/8/24

bertugas di bidang KB ini tetapi sangat ditentukan dengan kesediaan masyarakat luas untuk mengikuti program KB tersebut.

Indonesia yang dewasa ini dihadapkan pada berbagai persoalan perekonomian yang berawal dari kemerosotan nilai Rupiah atas Dollar Amerika. Kemerosotan perekonomian Indonesia yang diikuti persoalan disintegrasi bangsa yang demikian besarnya memberikan kesan bahwa pemerintah hanya terfokus pada pemecahan permasalahan tersebut, sehingga melupakan program-program pemerintah lainnya yang pada dasarnya merupakan suatu hal yang cukup besar dalam meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia, termasuk halnya dalam pelaksanaan program KB.

Akibat yang secara jelas mempengaruhi pelaksanaan program KB dari kemerosotan perekonomian Indonesia, adalah kurangnya penyediaan fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dalam pelaksanaan program KB. Fasilitas tersebut dapat berbentuk sarana dan prasarana dalam pelaksanaan KB.

Salah satu sisi negatif lainnya dari semakin sulitnya perekonomian Indonesia, adalah kehidupan masyarakat luas. Masyarakat luas juga secara langsung akan melupakan program KB sebagai program nasional, mereka akan lebih terfokus dalam penanggulangan perekonomian masing-masing keluarganya.

Untuk hal yang demikian meskipun Indonesia di hadapan pada krisis perekonomian yang berkepanjangan, masyarakat hendaknya dapat tetap dilibatkan dalam program keluarga berencana oleh aparatur-aparatur yang terkait dalam tugas KB ini.

Di sisi lain masyarakat desa yang tradisional dengan keterbatasannya cenderung hanya mempercayai informasi maupun pesan yang disampaikan oleh tokoh masyarakat. Karena keterbatasan dalam banyak hal disertai sikap yang sederhana serta kekeluargaan, biasanya informasi dan komunikasi di desa itu berlaku secara langsung atau tatap muka.

Secara umum komunikasi merupakan kebutuhan sosial yang mutlak, merupakan alat yang memiliki potensi yang meningkatkan pengetahuan dan pedoman kemajuan suatu kebudayaan. Masyarakat dalam batas unit sosial kecil dengan komunikasi tatap muka merupakan bentuk pokok hubungan sosial.

Seperti yang dikemukakan oleh Onong Uchjana Effendi " Komunikasi adalah sebagian proses dimana seseorang komunikator menyampaikan perangsang (pesan, lambang kata) untuk merubah tingkah laku komunikan ".<sup>1</sup>

Tidak terlepas dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah sebagai pemimpin resmi melalui PLKB bersama-sama dengan pemimpin tidak resmi seperti pemuka agama, tokoh adat maupun seorang yang patut diyakini memberikan informasi melalui komunikasi tatap muka dengan cara penyuluhan atau motivasi langsung demi terlaksananya program KB di pedesaan.

Secara khusus di dalam menjalankan program KB ditingkat pedesaan ditemukan banyak permasalahan, yang salah satunya adalah adat budaya yang hidup di pedesaan tersebut. Program KB dihadapkan pada permasalahan tersebut. Atau dengan kata lain bahwa Program KB akan menampilkan sesuatu yang selama ini

---

<sup>1</sup> Onong Uchjana Effendi, *Komunikasi dan Modernisasi*, Alumni, Bandung, 1970, hal. 10.

dikenal di sebuah pedesaan yaitu banyak anak banyak rezeki sedang KB berusaha membatasi jumlah anak.

Di satu sisi opinion leader serta kondisi opinion leader di daerah pedesaan seperti di Kelurahan Baringin Kecamatan Sipirok ini dipegang oleh pengetua-pengetua adat, orang yang dituakan serta tokoh alim ulama. Pengejewantahan hal-hal yang baru akan sangat berhubungan dengan orang-orang yang disebutkan sebagai opinion leader tersebut. Termasuk halnya di dalam pelaksanaan program KB yang sangat ditentukan oleh opinion leader tersebut, baik itu kaum alim ulama, cerdik pandai maupun pengetua-pengetua adat.

Berdasarkan keadaan di atas penulis terdorong untuk mengadakan penelitian tentang : " Peranan Opinion Leader Dalam Pelaksanaan program KB ". Oleh karena masalah tersebut masih memperlihatkan ruang lingkup yang luas dalam hal ini pembahasannya dipertegas lagi dengan sub judul : Suatu Studi Deskriptif Peranan Pemuka Agama Dalam Mendukung Keberhasilan Program KB di Kelurahan Baringin Kecamatan Sipirok Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan.

## B. Perumusan Masalah

Menurut Jalaluddin Rakhmat, " suatu penelitian ilmiah harus menguraikan rumusan masalah yang dianggap penting untuk diteliti. Selanjutnya masalah tersebut dirumuskan secara eksplisit dengan tujuan agar masalah tersebut menjadi jelas dan tegas " <sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Jalaluddin Rakhmat, *Metode Penelitian Komunikasi*, Remaja Karya, Bandung, 1989, hal. 8.

Adapun perumusan masalah dalam tulisan ini sebagai berikut :

“ Apakah pemuka agama berperan dalam mendukung keberhasilan program KB di kelurahan Baringin Kecamatan Sipirok ”.

### **C. Pembatasan Masalah**

Mengingat masalah yang begitu luas perlu diberikan batasan-batasan agar tidak terjadi kekaburan dalam penelitian ini yaitu :

1. Yang diteliti ialah peranan pemuka agama sebagai komunikator terhadap pelaksanaan program KB.
2. Pendapat masyarakat Kelurahan Baringin terhadap program KB.
3. Kesiediaan masyarakat Kelurahan Baringin menjadi peserta keluarga bahagia dan sejahtera.

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan pemuka agama sebagai komunikator terhadap pelaksanaan program KB.
2. Untuk mengetahui pendapat masyarakat Kelurahan Baringin terhadap program KB.
3. Untuk mengetahui tingkat kesiediaan masyarakat kelurahan Baringin menjadi peserta KB.

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah :

1. Sumbangan pemikiran kepada pemerintahan, khususnya yang berkaitan di dalam pencapaian tujuan program KB.
2. Guna memenuhi salah satu syarat dalam rangka memperoleh gelar Sarjana S-1 dalam bidang Ilmu Komunikasi Fisipol Universitas Medan Area.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka pemikiran di dalam pembahasan skripsi ini dilandasi oleh suatu konsep komunikasi di dalam penyampaian sesuatu pesan kepada masyarakat yang dilatar belakangi oleh pembentukan opinion leader.

Sepanjang berkaitan dengan usaha menumbuhkan kemauan masyarakat akan program KB, maka pemuka masyarakat ataupun pemimpin di dalam suatu kelompok masyarakat sangat mempunyai peranan yang menentukan di dalam keberhasilan suatu program termasuk halnya program KB. Keberadaan pemimpin masyarakat inilah yang akan mengkomunikasikan kepada masyarakatnya tentang suatu program.

Dengan penyampaian motivasi ataupun pesan berarti telah terjadi interaksi ataupun hubungan dan komunikasi telah berlangsung. Disinilah komunikasi antar personal (inter personal communication). Komunikasi sangat penting, selain berupa kegiatan pengoperan lambang juga merupakan kontak langsung dengan orang yang merupakan hubungan antar personal.

" Komunikasi antar pribadi (diadie communication) adalah komunikasi antar dua orang, dimana terjadi kontak langsung dalam bentuk percakapan secara tatap muka

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/24

(face to face).<sup>3</sup>

Wilbur Schram mengatakan " Media massa tidak dapat berperan secara langsung melainkan harus didukung oleh komunikasi antar pribadi supaya pesan-pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik ".<sup>4</sup>

Beberapa penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat perbedaan peranan yang dilakukan oleh komunikasi massa (memakai media). Kegiatan komunikasi yang memakai media (seperti surat kabar, radio, televisi, film) dipergunakan pada tahap memperkenalkan inovasi sedangkan komunikasi antar personal lebih penting peranannya daripada persuasi. Hal itupun berlaku pada situasi lingkungan yang mudah terjangkau oleh media massa, serta masyarakat yang berpengetahuan luas dan mempunyai golongan ekonomi yang mampu.

Lain halnya di pedesaan, media massa kurang dapat dipergunakan sekalipun dalam tahap pengenalan inovasi. Ini disebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan tersebut di atas seperti kurang tersedianya media massa yang dapat menjangkau khalayak pedesaan, dan rendahnya tingkat pengetahuan, juga dalam tingkat pendapatan serta tidak relevansinya pesan-pesan yang disampaikan atau kemungkinan media massa hanya dianggap sebagai alat hiburan.

Dalam alasan inilah kenyataannya komunikasi antar personal banyak menggantikan komunikasi media massa di pedesaan. Masyarakat desa lebih banyak

---

<sup>3</sup> Onong U. Effendy, I, *Dimensi-Dimensi Komunikasi*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 50.

<sup>4</sup> Edward Depari, *Peranan Komunikasi Dalam pembangunan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1985, hal. 40.

mengenal inovasi melalui komunikasi antar personal yang dilakukannya oleh para tokoh masyarakat. Everest M. Rogers seorang ahli sosiologi komunikasi mengatakan suatu proses pengambilan inovasi yang terdiri dari 4 (empat) tahap yaitu :

1. Pengenalan dimana seseorang mengetahui adanya inovasi dan memperoleh beberapa pengertian tentang bagaimana inovasi itu berfungsi.
2. Persuasi, dimana seseorang membentuk sikap berkenaan atau tidak berkenaan terhadap inovasi.
3. Keputusan dimana seseorang terlibat dalam kegiatan yang membawanya pada pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi.
4. Konfirmasi dimana seseorang mencari penguat bagi keputusan inovasi yang telah dibuat. Pada tahap ini mungkin terjadi seseorang merubah keputusannya jika ia menerima informasi yang bertentangan.<sup>5</sup>

Komunikasi antar personal merupakan kontak antara sumber dan penerima lebih banyak bersifat pribadi dengan efek yang lebih ampuh merubah sikap dan perilaku. Sehingga komunikasi antar personal peranannya lebih penting pada persuasi. Agar komunikasi itu efektif menurut Wilbur Schram pesan yang disampaikan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa, sehingga dapat menarik perhatian sasaran yang dimaksud.
2. Pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju pada pengalaman yang sama antara sumber dan sasaran, sehingga sama-sama dapat dimengerti.
3. Pesan harus dapat membangkitkan kebutuhan pribadi pihak sasaran dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan itu.
4. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh kebutuhan tadi, yang layak bagi situasi kebutuhan tadi, yang layak bagi situasi kelompok dimana sasaran berada pada saat ia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Evert M. Rogers dan F. Floyd Shomaker, *Memasyarakatkan Ide-Ide Baru*, terjemahan Abdillah Hanafi, Usaha Nasional, Surabaya, 1982, hal. 26.

<sup>6</sup> Onong Uchjana Effendy, II, *Komunikasi dan Modernisasi*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 53.

Dengan memperhatikan syarat di atas maka tokoh masyarakat dalam menggunakan komunikasi antar personal dihadapkan pada masalah bagaimana menimbulkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, dalam hal ini pelaksanaan program KB.



## BAB II

### URAIAN TEORITIS

#### A. Pengertian dan Proses Komunikasi

Pada prinsipnya ada berbagai pendapat para ahli tentang pengertian komunikasi. Namun kesemuanya itu adalah saling mendukung dan memudahkan pemahaman kita akan pengertian komunikasi.

Komunikasi merupakan suatu kegiatan usaha manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pikiran dan perasaannya kepada orang lain. Dapat dikatakan bahwa dalam proses komunikasi bukan saja penyampaian (pesan) akan tetapi juga umpan balik (feed back) dari si penerima perlu diperhatikan.

Sebagaimana Carl I. Hovland yang dikutip dari buku Onong Uchjana bahwa :  
 “ Communication is the process to modify the behavior of the other individuals (komunikasi adalah proses merubah perilaku orang lain) ”.<sup>7</sup>

Dengan demikian perlu diketahui, seseorang akan dapat merubah sikap, opini atau perilaku orang lain apabila memang komunikatif.

Mendukung pendapat terdahulu Wilbur Schram seorang ahli komunikasi kenamaan menyatakan bahwa :

“ Komunikasi akan berhasil, apabila pesan yang disampaikan komunikator cocok

---

<sup>7</sup> Onong Uchjana Effendy, III, *Radio, Siaran, Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 2.

dengan kerangka acuan (frame of reference), yakni paduan pengalaman dan pengertian (collective of experiences and meaning) yang pernah diperoleh komunikan".<sup>8</sup>

Berdasarkan pendapat di atas dapat dikatakan bahwa dalam proses komunikasi perlu diperhatikan pesan yang disampaikan. Sebab proses komunikasi pada hakekatnya merupakan penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang (komunikator) kepada orang lain (komunikan). Pikiran dimaksudkan dapat berupa gagasan, informasi, opini dan lain-lain.

Kemudian definisi yang diutarakan oleh Onong Uchjana Effendy berbunyi :  
 " Komunikasi adalah proses penyampaian lambang-lambang yang mendukung pengertian yang sama oleh seseorang kepada orang lain, baik dengan maksud agar mengerti maupun agar berubah tingkah lakunya ".<sup>9</sup>

Proses berlangsungnya komunikasi sangat tergantung pada pemakaian lambang-lambang yang dipergunakan baik berbentuk verbal maupun non verbal. Sejalan dengan pendapat di atas, maka Soekartawi bahwa :

" Komunikasi adalah suatu pernyataan antar manusia baik secara perseorangan maupun secara berkelompok , yang bersifat umum (tidak bersifat rahasia) dengan menggunakan tanda-tanda, kode-kode atau lambang-lambang tertentu ".<sup>10</sup>

Lambang-lambang yang dipergunakan dimaksud sebagai pernyataan yang disampaikan oleh komunikator.

<sup>8</sup> Ibid, hal. 8.

<sup>9</sup> Ibid, hal. 6.

<sup>10</sup> Soekartawi, *Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian*, UI. Press, Jakarta, 1988, hal. 24.

Penggunaan lambang-lambang tersebut baik melalui bahasa maupun melalui gerak tertentu akhirnya akan menghasilkan umpan balik. Umpan balik memainkan peranan penting dalam komunikasi sebab akan menentukan berlanjutnya komunikasi atau berhentinya komunikasi yang dilancarkan komunikator. Dikatakan bahwa :

“ Komunikator yang baik adalah orang yang selalu memperhatikan umpan balik, sehingga ia dapat segera merubah gaya komunikasinya di kala ia mengetahui bahwa umpan balik dari komunikan bersifat negatif “. <sup>11</sup>

Dalam hal ini komunikator perlu bersikap tanggap terhadap tanggapan komunikan agar komunikasi yang telah berhasil sejak awal dapat dipelihara keberhasilannya.

Bila kita teliti dari pengertian-pengertian yang diutarakan para ahli terdahulu maka sebenarnya telah diutarakan oleh Lasswell. Untuk memahami pengertian komunikasi sehingga dapat berlangsung lancar maka perlu dikemukakan paradigma yang dikemukakan oleh Harold Lasswell.

Lasswell mengatakan bahwa cara yang baik untuk menjelaskan komunikasi ialah menjawab pertanyaan sebagai berikut : Who says, what in which channel to whom with what effect.

Jadi dapat disimpulkan bahwa paradigma Lasswell menunjukkan bahwa komunikasi meliputi 5 (lima) unsur sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan yakni :

- Komunikator (communicator, source, sender)

---

<sup>11</sup> Onong Uchjana Effendy, III, *Op.Cit*, hal. 10.

- Pesan (message)
- Media (Channel, media)
- Komunikan (commnicant, commnucative, receiver, recipient)
- Efek (effect, impact, iinfluence).

Berdasarkan paradigma tersebut maka dapat dikatakan bahwa " ..... Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang menimbulkan efek tertentu ".<sup>12</sup>

Situasi demikian ini mengakibatkan bahwa pesan yang akan disampaikan harus direncanakan dan disampaikan sedemikian rupa, sehinga message itu dapat menarik perhatian sasaran yang dituju (komunikan). Sehingga agar pesan tadi sampai perlu memakai saluran (Chnannel).

Disebutkan oleh Edward Depari bahwa :

" Saluran komunikasi adalah alat melalui mana sumber komunikasi menyampaikan pesan-pesan (massages) kepada penerima (receiver).

Saluran ini dapat dianggap sebagai penerus penyampaian pesan yang berasal dari sumber informasi kepada tujuan informasi ".<sup>13</sup>

Pemilihan media yang tepat sangat penting dalam proses komunikasi sebab akan dapat menghambat dan mempelancar kelangsungannya. Onong Uchjana Effendy mengatakan bahwa :

" Pentingnya peranan media, yakni media sekunder, dalam proses komunikasi, disebabkan efisiensinya dalam mencapai komunikan. Surat kabar, radio atau televisi,

<sup>12</sup> Ibid, hal. 3.

<sup>13</sup> Edward Depari, *Op.Cit*, hal. 16.

misalnya merupakan media yang efisien dalam mencapai komunikan dalam jumlah yang amat banyak".<sup>14</sup>

Penggunaan saluran komunikasi banyak tergantung pada maksud dan tujuan komunikasi. Dan penentuan media yang akan dipergunakan sebagai hasil dari sekian banyak alternatif, perlu didasari siapa komunikan yang akan dituju. Dengan demikian dapat dipahami yang mana setiap media memiliki ciri atau sifat tertentu yang efektif dan efisien untuk dipergunakan bagi penyampaian suatu pesan tertentu.

Dengan pertimbangan pada penyampaian pesan dan media yang dipergunakan Onong Uchjana Effendy menegaskan bahwa :

..... memberi proses komunikasi dua tahap yakni secara primer, dan sekunder. Secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang (symbol) sebagai media. Secara sekunder adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertama.<sup>15</sup>

Karena komunikasi itu merupakan proses dimulai dari pengambilan perhatian, hingga kepada tindakan mempengaruhi agar berbuat apa yang kita harapkan membuat perlunya berpikir lebih mendalam. Untuk itu bukan hanya komunikasi primer saja atau komunikasi sekunder saja akan tetapi lebih baik memadukan kedua-duanya sehingga komunikatif.

<sup>14</sup> Onong Uchjana Effendy, III, *Op.Cit*, hal. 12.

<sup>15</sup> Onong Uchjana Effendy, IV, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*, Remaja Karya, Bandung, 1984, hal. 14.

## B. Pengertian Opinion leader

Istilah opinion leader/pemuka pendapat dicetuskan pertama sekali oleh Paul Lazarsfeld pada tahun 1940 sebagai hasil penelitiannya yang memperkenalkan model komunikasi dua tahap. Dalam proses komunikasi ini opinion leader (pemuka pendapat) akan menyampaikan suatu informasi atau komunikasi antar persona kepada orang-orang yang berada dalam lingkungan pengaruh mereka.

Menurut Paul Lazarsfeld : " pemuka pendapat adalah sumber informasi atau pendapat, para pengikutnya adalah penerima informasi (receivers) ".<sup>16</sup>

Selain itu Oemi Abdurrachman mengatakan :

Opinion Leaders, yaitu orang-orang yang mempunyai pengaruh terhadap orang-orang di lingkungannya memegang peranan penting, yang tidak kalah pentingnya dengan mass media, di dalam pembentukan opini individu-individu, informasi yang mereka peroleh bukan saja dari mass media, tetapi juga dari orang-orang tertentu yang boleh dianggap berwenang dan dapat dipercaya (reliable).<sup>17</sup>

Opinion Leader/pemuka pendapat ini dapat merupakan seorang alim ulama, cerdik pandai, kiyai, ketua adat, ustadz, pensiunan pegawai negeri, pensiunan TNI, guru, seorang petani dan terdapat dimana –mana dalam struktur sosial manapun dan mempunyai hubungan pribadi (kontak pribadi) dengan orang-orang di lingkungannya.

Opinion Leader/pemuka pendapat yang terdiri dari orang-orang biasa yang tidak mempunyai suatu kedudukan atau jabatan resmi disebut informal leader,

<sup>16</sup> Edward Depari, *Op.Cit*, hal. 21.

<sup>17</sup> Oemi Abdurrachman, *Dasar-Dasar Public Relation*, Alumni, Bandung, 1989, hal. 57.

sedangkan opinion leader yang terdiri dari pejabat-pejabat resmi baik dalam pemerintahan maupun dari swasta disebut formal leader.

Charles R. Wright menjelaskan tentang opinion leader/pemuka pendapat sebagai berikut :

Dalam bentuk yang lebih mudah, kata pemuka pendapat menunjukkan individu-individu yang melalui kontak-kontak personalnya sehari-hari mempengaruhi orang lain dalam hal pembentukan keputusan dan pendapat. Pemuka pendapat tidak perlu merupakan pemimpin-pemimpin formal suatu masyarakat atau orang-orang yang tertentu yang mempunyai jabatan tertentu berdasarkan prestise sosial. Setiap tingkatan masyarakat agaknya memiliki kelompok pemuka pendapatnya sendiri-sendiri.<sup>18</sup>

Selanjutnya Charles R. Wright menyatakan pula, bahwa " pemuka pendapat akan dapat diidentifikasi secara mudah dengan cara menanyai responden kepada siapa mereka umumnya meminta saran atau bantuan dalam mengambil keputusan tentang berbagai macam masalah ".<sup>19</sup>

Namun cara ini mengandung kelemahan karena kemungkinan ada opinion leader/pemuka pendapat yang berada di luar sampel atau opinion leader / pemuka pendapat yang tidak tercatat karena orang-orang yang mereka pengaruhi tidak ada dalam sampel sehingga tidak menunjukkan mereka. Tetapi ia juga memberikan jalan keluarnya, yaitu cara yang mengidentifikasi opinion leader di antara orang-orang yang informasinya telah dapat dikumpulkan, yakni mereka-mereka yang berada pada sampel.

---

<sup>18</sup> Charles R. Wright, *Sosiologi Komunikasi Massa*, Suntingan Jalaluddin Rakhmat, Remaja Karya, Bandung, 1986, hal. 99.

<sup>19</sup> Ibid, hal. 99.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan tentang opinion leader sebagai berikut :

1. Opinion leader terdapat pada seluruh struktur sosial. Pengaruh personal mengalir bukan hanya dari atas ke bawah tetapi juga horizontal dalam masyarakat.
2. Opinion leader merupakan orang yang waspada, tertarik dan aktif secara politis.
3. Opinion leader lebih ditempa oleh kampanye media massa daripada yang bukan opinion leader, dan mereka lebih banyak memakai massa.
4. Opinion leader mempergunakan gagasan dan informasi yang mereka berikan pada pengikutnya.

Winardi memberikan batasan yang jelas mengenai formal leader dengan rumusan sebagai berikut :

Pemimpin formal adalah seseorang (pria atau wanita) yang oleh organisasi tertentu (swasta atau pemerintah yang ditunjuk (berdasarkan surat-surat keputusan pengangkatan dari organisasi yang bersangkutan) untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasinya berkaitan dengannya, untuk mencapai sasaran organisasi tersebut yang ditetapkan sejak semula.<sup>20</sup>

Sedangkan untuk pemimpin informal ia memberikan rumusan sebagai berikut :

Informal leader adalah seorang individu (pria atau wanita) yang walaupun tidak mendapatkan pengangkatan formil juridis sebagai pemimpin, memiliki suatu kualitas (objektif maupun subjektif) yang memungkinkannya mencapai kedudukan sebagai orang yang dapat mempengaruhi kelakuan serta tindakan sesuatu kelompok masyarakat, baik dalam arti positif maupun negatif.<sup>21</sup>

<sup>20</sup> Winardi, *Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Management*, Alumni, Bandung, 1983, hal. 47.

<sup>21</sup> Ibid, hal. 55.

### C. Pengertian dan Sejarah Keluarga Berencana

Istilah Keluarga Berencana (KB), merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris " Family Planning ", yang dalam pelaksanaannya di Negara-negara Barat mencakup dua macam metode (cara), yaitu :

1. Planning Parenthood.

Pelaksanaan metode ini menitik beratkan tanggung-jawab kedua orang tua untuk membentuk kehidupan rumah tangga yang aman, tenteram, damai, sejahtera dan bahagia, walaupun bukan dengan jalan membatasi jumlah anggota keluarga.

2. Birth Control

Penerapan metode ini menekankan jumlah anak, atau menjarangkan kelahiran, sesuai dengan situasi dan kondisi suami isteri.<sup>22</sup>

Keluarga Berencana juga mempunyai arti sama dengan istilah Arab ( Pengaturan keturunan/ kelahiran) bukan pembatasan kelahiran.<sup>23</sup>

KB berarti pasangan suami isteri telah mempunyai perencanaan yang konkrit mengenai kapan anaknya diharapkan lahir agar setiap anaknya lahir disambut dengan rasa gembira dan syukur.

Keluarga Berencana ialah suatu usaha yang mengatur banyaknya jumlah kelahiran sedemikian rupa, sehingga bagi ibu maupun bayinya, dan bagi ayah serta keluarganya atau masyarakat yang bersangkutan, tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat langsung dari kelahiran tersebut.

Keluarga Berencana (KB) atau family Planning (Planned parenthood) atau Tandhimu al-Nash adalah pengaturan keturunan, yaitu pasangan suami isteri yang mempunyai perencanaan yang konkret mengenai kapan anak-anaknya diharapkan lahir. Sejumlah anak yang didambakan itu telah diperhitungkan

---

<sup>22</sup> Mahjuddin, *Masailul Fiqhiyah, Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*, Penerbit Kalam Mulia, Jakarta, 1992, hal. 56.

<sup>23</sup> Cholil Uman, *Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Moderen*, Penerbit Sunan Ampel Suci, Surabaya, 1994, hal. 76.

dengan kemampuan dan kesanggupan suami – isteri dan situasi-kondisi masyarakat dan negaranya. Dengan kata lain, KB dititik beratkan pada perencanaan, pengaturan dan pertanggung-jawaban orang tua terhadap anggota keluarganya, agar dengan mudah dan secara matematis dapat mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan sejahtera. Untuk itu dilakukan berbagai upaya atau cara agar dalam kegiatan hubungan suami isteri (senggama) tidak terjadi kehamilan (ovulasi).<sup>24</sup>

Dari definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa KB adalah pengaturan rencana kelahiran anak dengan melakukan suatu cara atau alat yang dapat mencegah kehamilan. KB bukanlah berarti Birth Control atau Tahdid al-Nasl yang konotasinya pembatasan atau mencegah kelahiran. Hal mana bertentangan dengan tujuan perkawinan yaitu melanjutkan keturunan.

Perencanaan merupakan hak dan wewenang setiap manusia, termasuk perencanaan berkeluarga dengan jumlah anak yang mungkin mampu ia tangguhkan sesuai dengan kondisinya masing-masing. Perencanaan keluarga adalah merencanakan kelahiran dengan merencanakan kehamilan karena memakai atau menggunakan suatu cara atau alat yang disebut kontrasepsi.

Pertambahan penduduk di Indonesia, semakin lama semakin menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan, karena tidak sesuai dengan peningkatan perekonomian negara. Pertambahan penduduk lebih cepat, sedangkan perekonomian negara jauh lebih ketinggalan daripadanya.

Kalau hal tersebut di atas tidak segera ditanggulangi, maka akan berpengaruh negatif terhadap pembangunan nasional, karena pemerintah bisa kewalahan menyediakan sarana perekonomiannya,

<sup>24</sup> H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, ***Problematika Hukum Islam Komtemporer***, Penerbit Pustaka Firdaus, 1994, Jakarta, hal. 143.

fasilitas kesehatan, sarana pendidikan, tempat wisata dan sebagainya.

Dengan menyadari ancaman yang bakal terjadi, maka pemerintah menjadikan Program Keluarga Berencana sebagai bahan dari pembangunan nasional, yang kegiatannya dimulai sejak Pelita I yang lalu.

Dalam kegiatan selanjutnya, Keluarga Berencana di Indonesia mengalami proses yang tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di negara-negara yang sedang berkembang lainnya, yaitu sangat ditentukan oleh alasan kesehatan. Tetapi perkembangan selanjutnya, semakin disadari lagi, bahwa permasalahannya bertambah luas, dimana Keluarga Berencana dianggap sebagai salah satu cara untuk menurunkan angka kelahiran, sebagai suatu sarana untuk mengendalikan penambahan penduduk yang semakin pesat.

Sejak tahun 1957, sudah ada perkumpulan swasta yang bergerak di bidang Keluarga Berencana (KB), yang bernama " Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) ", tetapi ketika itu, pemerintah belum meresponnya, karena faktor suasana politik yang belum memungkinkannya.

Ketika tahun 1967, baru terlihat ada persiapan-persiapan menuju kepada pelaksanaan program tersebut. Dan sejak itu pula, pemerintah mulai mendorong masyarakat Indonesia, untuk menciptakan iklim yang menguntungkan pelaksanaan program KB secara Nasional. Maka pada tahun 1968, Presiden menginstruksikan kepada Menteri Negara Kesejahteraan Rakyat, melalui SK. Presiden No. 26 Tahun 1968, yang bertujuan untuk membentuk suatu lembaga resmi pemerintah, yang bernama "Lembaga Keluarga Berencana Nasional (LKBN)", yang bertugas untuk mengkoordinir kegiatan Keluarga Berencana. Kemudian pada Tahun 1969, program

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
  2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
  3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
- Access From (repository.uma.ac.id)7/8/24

tersebut mulai dimasukkan ke dalam program pembangunan Nasional pada Pelita I.

Dan kira-kira satu tahun sesudahnya, maka pemerintah menganggap perlu membentuk suatu Badan Pemerintah, yang diberi nama dengan "Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)", yang bertugas untuk mengkoordinir semua kegiatan KB di Indonesia. Maka sejak itu pula, masalah kependudukan di Indonesia sudah bisa dikendalikan dengan baik. Serta seluruh lembaga pemerintah dan Swasta, mengambil bagian untuk menyukseskan pembangunan Nasional dibidang kependudukan.

Apabila laju pertumbuhan sudah dapat dikendalikan dengan program KB, maka pemerintah sudah bisa mengupayakan peningkatan kualitas penduduk, dengan cara menyediakan fasilitas perekonomian, kesehatan, pendidikan dan sebagainya, sehingga pada masa yang akan datang, penduduk Indonesia semakin tinggi kualitas hidupnya dan semakin maju pula tingkat kecerdasannya.

#### D. Metode Keluarga Berencana

Metode keluarga berencana dapat dibedakan dalam dua garis besar yaitu :

1. Metode pemakaian alat atau cara kontrasepsi dengan bantuan perantara seorang ahli medis dengan suatu tindakan yang fisik pada wanita atau laki-laki, yang sungguh-sungguh dirasakan tindakan tersebut secara badaniah oleh yang bersangkutan, selanjutnya dalam karangan ini disebut alat-alat/cara kontrasepsi dengan benda/tindakan perantara.
2. Metode dengan memanfaatkan hari-hari subur dan tidak subur dalam badan seorang wanita bagi hubungan kelamin antara suami isteri, selanjutnya disebut metode kalender atau metode pantang berkala.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Amrah Muslimin, *Keluarga Berencana (Pantang Berkala) Aspek Masalah Kependudukan*, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1983, hal. 39.

## **Alat-alat/cara kontrasepsi dengan benda/tindakan perantara**

### a. Bersifat tidak permanen

#### - Spiral atau IUD

Dalam golongan ini termasuk alat perantara, yang sedang banyak dilakukan secara umum dalam masyarakat, ialah alat spiral atau IUD singkatan dari Intra Uterine Devices.

Alat yang melingkar-lingkar seperti spiral ini, dibuat antara lain dari semacam plastik atau bahan sejenis, dimasukkan dengan alat khusus melalui vagina ke dalam rongga rahimnya, yang berfungsi secara mekanis mencegah kehamilan pada wanita, sungguhpun suami isteri melakukan hubungan kelamin atau coitus dan dalam hubungan tersebut terjadi pembuahan, penyatuan antara sel benih laki-laki dan sel benih telur wanita. Alat ini di luar negeri seperti di Amerika dan di Jepang sudah umum dipergunakan sebagai pencegah kehamilan. Yang memasukkan alat spirla ini harus seorang ahli medis atau perawat yang telah dilatih untuk ini, agar jangan terjadi kesalahan-kesalahan dalam letaknya dan arahnya. Wanita yang memakai alat spiral ini harus senantiasa dibawah pengawasan ahli kesehatan dan berkonsultasi dengan ahli-ahli kesehatan dimaksud, apalagi kalau ada hal-hal yang dirasa tidak serasi, seperti adanya pendarahan atau badan merasa demam-demam dan tidak senang. Pada rakyat umum cara ini banyak diterapkan di samping cara meneguk tablet menurut nasihat dan petunjuk Dokter.

#### - Pemakaian kondom (sarung zakar)

Singkat sebelum suami isteri mengadakan hubungan seksual, penis alat

kemaluan laki-laki disarungi dengan sarung, yang dibuat dari karet yang sangat tipis, sarung mana membesar atau mengecil menurut penis laki-laki (penis = zakar).

Sperma yang keluar tetap tinggal dalam sarung karet itulah, jadi tidak masuk dalam rongga rahim wanita. Pertemuan sel benih laki-laki dengan sel benih telur wanita dihindarkan dengan pemakaian Kondom tersebut.

- Pemakaian diafragma atau pessarium (penutup pintu rahim = cervik)

Sebelum berhubungan seksual suami isteri, sang isteri memasukkan dahulu dalam vagina suatu benda dari karet yang agak tebal berbentuk sebagai topi atau cincin, yang menutup dengan sifat elastisitasnya pintu rahim sehingga sperma, tidak dapat melalui pintu dan memasuki rongga rahim ini, dalam waktu tertentu dan dalam keadaan biasa, sel benih telur wanita yang subur menunggu benih laki-laki. Dengan terhalangnya pertemuan kedua jenis sel benih itu, hubungan seksual suami isteri tidak akan menyebabkan kelahiran keturunan. Pemakaian ini biasanya dipersamakan waktu dengan pemakaian cairan agak kental (seperti kanji, agar-agar) yang dimasukkan juga dalam vagina wanita, gunanya untuk menolong pessarium supaya tutupan mulut rahim lebih rapat dan rapi, sehingga sperma laki-laki betul-betul tidak melewati mulut rahim dan memasukinya. Air kanji, agar-agar atau lain-lain lahi (gelatine glycerine, yang dapat dibeli diapotik atas resep dokter) dapat juga dicampuri obat untuk melemahkan sel-sel benih laki-laki, sehingga tidak dapat lagi memenuhi syarat-syarat untuk menjadikan keturunan. Sebelum pessarium ini dibuka lagi, setelah hubungan seksual suami isteri selesai, liang

vagina wanita itu disirami dahulu dengan air yang biasanya dimasuki juga (chinine) untuk membersihkan vagina itu dari sperma yang mungkin masih mengandung sel benih yang subur.

- Suatu cara yang menurut ahli-ahli kedokteran juga terpakai, ialah dengan tidak memakai sesuatu benda perantara, tetapi berjaga-jaga dalam hubungan seksual suami isteri, supaya pada saat sperma terasa hendak keluar dari zakarnya, pria yang bersangkutan secara tepat waktu mengeluarkan penisnya dari vagina wanita, sehingga sperma itu tidak masuk rahim (coitus interruptus = jimak azal = senggama azal).

- Pil atau suntikan

Masih dalam golongan metode kontrasepsi yang bersifat tidak permanen ini tidak boleh dilupakan cara-cara kontrasepsi dengan menggunakan pil-pil tablet atau suntikan – suntikan yang mengandung zat-zat kimiawi, yang apabila diminum atau disuntikkan, mempengaruhi dalam arti mencegah untuk jangka waktu tertentu pelepasan sel benih telur wanita dari indungnyanya, sehingga hubungan kelamin suami isteri, tidak menyebabkan pertemuan benih laki-laki dan wanita dan tidak terjadi pembuahan yang akan menyebabkan kehamilan isteri yang bersangkutan dan kelahiran anak sebagai kelanjutannya. Tentu saja tablet-tablet atau obat suntikan yang diperlukan harus dibeli dengan resep dokter, begitupun cara mempergunakannya baik dosis, maupun jarak waktunya harus senantiasa diminta nasehat dan petunjuk dokter, untuk mencegah over dosis/kebanyakan menelan pil atau suntikan. Apabila minum tablet atau suntikan diberhentikan, indung telur

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/24

bekerja biasa lagi dan hubungan seksual suami isteri mudah menimbulkan keturunan.

b. Cara Kontrasepsi yang bersifat permanen

- Pemandulan (sterilisasi) wanita, yang disebut tubektomi. Pengikatan atau pemutusan saluran, yang menghubungkan indung telur (sumber sel-sel telur wanita) dengan rongga rahim, saluran mana adalah tempat lewatnya sel telur yang terlepas dari indungnya menuju ke rongga rahim.
- Pemandulan (sterilisasi) laki-laki yang disebut vasektomi. Pemutusan saluran, yang menghubungkan zakar laki-laki dengan penisnya, yang merupakan saluran sel laki-laki yang diproduksi dalam zakar menuju saluran penis, yang mengeluarkan sel-sel tersebut pada waktu hubungan seksual suami-isteri dan memasukkannya dalam rongga rahim melalui vagina wanita.

## BAB III

### METODOLOGI PENELITIAN

#### A. Populasi dan Sampel

Populasi adalah sekelompok unsur daripada suatu obyek penelitian. Maka dengan demikian populasi yang diajukan didalam penelitian ini adalah mencakup anggota keluarga di Kelurahan Baringin Kecamatan Sipirok yang mengikuti program KB yaitu sebanyak 300 KK.

Pengambilan sampel dilakukan menurut pendapat Suharsimi Arikunto (1991, hal. 107) menyatakan bahwa jika jumlah populasi besar dapat diambil sampel antara 10% - 15% atau 20% - 25%. Maka berdasarkan hal tersebut pengambilan sampel dalam penelitian ini sebesar  $25\% \times 300 = 75$  orang.

Dengan demikian maka sampel yang diajukan dalam penelitian ini adalah 75 orang.

#### B. Metode Pengumpulan Data

Di dalam melaksanakan pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini penulis menggunakan :

##### 1. Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Dengan penelitian kepustakaan ini dimaksudkan usaha mempelajari buku-buku, majalah ilmiah, bahan perkuliahan dan literatur atau bahan lainnya yang dianggap

---

<sup>26</sup> Suharsini Arikunto, *Metode Penelitian Komunikasi*, Remaja Karya, Bandung, 1991, hal 107.

relevan dengan masalah yang diteliti.

## 2. Penelitian Lapangan (Field Research).

Dalam penelitian lapangan ini, guna memperoleh data atau informasi penulis langsung terjun ke lapangan dengan pokok permasalahan dengan mengadakan :

- a. Interview (wawancara), yaitu dilakukan terhadap para pejabat yang berwenang untuk memberikan informasi, terutama pihak Kelurahan Baringin Kecamatan Sipirok.
- b. Angket (Quisioner).

Dalam hal ini juga penulis menyebarkan angket yang berupa daftar pertanyaan kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana disebutkan dalam populasi dan sampel terdahulu.

## C. Variabel dan Definisi Operasional

Variabel yang menjadi perhatian penelitian indikatornya harus jelas dalam arti dapat diamati dan diukur.

Kejelasan operasional variabel akan membantu memudahkan menyusun alat penelitian.

Pada penulisan skripsi ini nantinya penulis akan mengemukakan tiga variabel yang sangat menentukan dan saling berhubungan. Ketiga variabel dimaksud dapat dilihat dari tabel berikut ini :

TABEL 1  
DAFTAR KERANGKA KONSEP

INDEPENDENT VARIABLE	INTERVENING VARIABLE	DEPENDENT VARIABLE
Pemuka Agama	Responden	Program KB
1. Pengertian Tentang KB 2. Jalur Informasi Tentang KB 3. Sumber Mengenai Keterangan KB 4. Jenjang Mutu Informasi 5. Pertemuan KB 6. Keyakinan 7. Pelaksanaan Aturan KB	1. Umur 2. Tingkat Pendidikan 3. Jenis Pekerjaan	1. Memasyarakatkan KB 2. Membantu Peningformasian KB 3. Informasi Tambahan Tentang KB 4. Media Komunikasi Massa Yang Dipakai 5. Peran Serta Pemuka Agama 6. Pendapat Akseptor Tentang Peran Serta Pemuka Agama 7. Dukungan Dalam Mencapai Tujuan KB 8. Motivasi Menjadi Akseptor

Variabel-variabel di atas akan dijelaskan dalam bentuk definisi operasional sebagai berikut :

1. Umur adalah usia responden
2. Tingkat pendidikan adalah pendidikan terakhir responden
3. Jenis pekerjaan adalah pekerjaan yang dilakukan responden sekarang
4. Pengertian tentang KB adalah penafsiran responden mengenai makna dari program Keluarga Berencana (KB)

5. Jalur informasi tentang KB adalah jalur yang dipakai oleh responden dalam mendapatkan informasi KB.
6. Sumber mengenai keterangan KB adalah pihak-pihak yang memberikan keterangan tentang program KB.
7. Jenjang mutu informasi adalah keabsahan dari informasi yang diberikan oleh pihak berwenang dalam program KB.
8. Pertemuan KB adalah frekuensi keterlibatan responden dalam menghadiri pertemuan KB.
9. Keyakinan adalah tingkat keyakinan responden terhadap informasi dan keterangan yang diberikan dalam program KB.
10. Pelaksanaan aturan KB adalah dipenuhinya aturan-aturan ber KB oleh responden.
11. Memasyarakatkan KB adalah peran serta yang diberikan responden dalam menjalankan program KB.
12. Membantu penginformasian KB adalah peran serta yang diberikan responden dalam hal memberikan masukan-masukan tentang program KB.
13. Informasi tambahan tentang KB adalah keterlibatan responden dalam hal mendapatkan informasi tambahan tentang pelaksanaan program KB.
14. Media komunikasi massa yang dipakai adalah bentuk-bentuk atau alat-alat yang dipakai responden dalam mendapatkan informasi tambahan tentang KB.
15. Peran serta pemuka agama adalah keterlibatan dari pemuka agama dalam menjalankan dan menginformasikan tentang program KB.
16. Pendapat akseptor tentang peran serta pemuka agama adalah frekuensi pelaksanaan program KB yang melibatkan pemuka agama.

17. Dukungan dalam mencapai tujuan KB adalah kerja sama yang diberikan responden dalam pencapaian tujuan program KB.
18. Motivasi menjadi akseptor adalah tujuan yang ingin dicapai oleh responden di dalam mengikuti program KB.

#### D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan mendiskriptikan data dengan menggunakan tabel tunggal atau persentase jawaban responden.



## BAB IV

### DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

#### **A. Gambaran Singkat Tentang Baringin Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan**

##### **1. Gambaran Umum Kelurahan Baringin**

Kelurahan Baringin adalah salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan terletak pada 03.<sup>30</sup> Garis Lintang Utara dan 98 <sup>46</sup> Bujur Timur. Di Kelurahan Baringin terdapat 5 lingkungan. Luas Kelurahan Baringin sekitar 50 Ha atau 0,50 km<sup>2</sup>, terletak sekitar 300 meter di atas permukaan air laut dengan batas-batasnya :

- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Kampung Setia
- Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Hutaraja
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pasorminan dan Desa Sumuran.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padang Matinggi.

Kelurahan Baringin beriklim tropis karena terletak di daerah khatulistiwa. Perubahan iklim yang jelas tidak pernah terjadi. Secara umum daerah ini hanya mengenal dua musim saja yaitu musim penghijau dan musim kemarau, diselingi dengan musim pancaroba.

Musim penghujan mulai di bulan September sampai dengan Bulan April, sedangkan musim kemarau terjadi pada Bulan Juli dan Agustus, dan pada bulan Mei/Juni terjadi musim pancaroba atau peralihan.

Dengan demikian curah hujan di Kelurahan Baringin dapat dikatakan mencukupi, dan pergantian musim tidak begitu mempengaruhi potensi pertanian rakyat. Sebab musim hujan relatif singkat dan dalam musim kemarau turun juga curah hujan sehingga umumnya tidak menghalangi hambatan-hambatan yang berarti.

Kelurahan Baringin terdiri dari 4 (empat) dusun mempunyai 2 rukun warga (RW) dan 47 rukun tetangga (RT), nama dusunnya adalah sebagai berikut :

1. Dusun I
2. Dusun II
3. Dusun III
4. Dusun IV

Luas Kelurahan Baringin adalah 1.870 Ha. Uraian pemanfaatan lahannya adalah sebagai berikut :

1. Tanah yang dikerjakan dengan perincian :

a. Sawah	1465.	Ha
b. Ladang	704.	Ha
c. Perumahan	156.	Ha
d. Perkebunan rakyat	250.	Ha
e. Kolam	325.	Ha
f. Jalan	1.	Ha
g. Lapangan Olah Raga	2,5.	Ha
h. Lain-lain	2.	Ha

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/8/24

## 2. Tanah yang belum dikerjakan terdiri dari :

a. Hutan	332.	Ha
b. Rawa-rawa	26	Ha
c. Lain-lain	46.	Ha

Dari tanah yang dikerjakan, sawah merupakan areal yang terluas. Sawah-sawah tersebut tidak mengalami masalah pengairan. Curah hujan mencukupi. Dan perkebunan kelapa milik masyarakat, juga terdapat kebun karet rakyat, yang merupakan sumber penghasilan rakyat sehari-hari. Ladang juga merupakan mata pencaharian penduduk setempat. Sebagian tanah pekaranganpun sudah dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menanam sayur-mayur untuk penambahan penghasilan sehari-hari. Hal ini berkat usaha dan petunjuk dari PKK dan masyarakat lainnya sebagai contoh. Selebihnya kolam, jalan, lapangan olah raga dan lain sebagainya.

## 2. Faktor Demografis

### a. Penduduk

Penduduk Kelurahan Baringin berjumlah 1438 jiwa, terdiri dari 707 jiwa laki-laki dan 731 jiwa perempuan. Komposisi penduduk Kelurahan Baringin dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel I  
Komposisi Penduduk Menurut Umur  
(Keadaan Akhir Desember 1999)

Klasifikasi Umur	Jumlah
0 – 4	162
5 – 9	177
10 – 14	185
15 – 25	325
26 – 45	337
46 – 55	160
56 k e atas	91
Jumlah	1438 jiwa

Sumber : Kantor Kelurahan Baringin

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk yang berusia antara 26 – 45 tahun adalah penduduk yang terbanyak yaitu 337 jiwa. Penduduk pada usia tersebut adalah usia produktif. Dalam pelaksanaan pembangunan usia produktif ini sangat dibutuhkan sekali sehingga dari banyaknya usia produktif di Kelurahan Baringin maka pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan semestinya.

Untuk melihat pembagian jumlah penduduk berdasarkan pembagian wilayah di Kelurahan Baringin

Tabel II

Penduduk Tiap Dusun  
(Akhir Desember 1999)

D u s u n	J u m l a h	
	Penduduk Jiwa	KK/Jiwa
Dusun I	359	85
Dusun II	520	105
Dusun III	416	80
Dusun IV	143	32
Jumlah	1438	302

Sumber : Kantor Lurah Baringin

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Dusun II memiliki jumlah penduduk lebih dari dusun-dusun lainnya, diikuti oleh Dusun III, Dusun I dan terakhir adalah Dusun IV.

Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan agama dapat dilihat berikut ini :

Tabel 3

Penduduk Menurut Agama  
(akhir Desember 1999)

Agama	Jumlah	%
Islam	1431	99
Protestan	7	1
Jumlah	1438	100

Sumber : Kantor Lurah Baringin

Dari tabel di atas maka dapat dilihat bahwa hampir seluruh penduduk Kelurahan Baringin beragama Islam, dengan jumlah 1426 atau 99 % dari seluruh

penduduk Kelurahan Baringin, sedangkan jumlah 7 jiwa pemeluk agama protestan hanya mencakup 1 Kepala Keluarga saja.

## B. Pasangan Usia Subur (PUS)

Pasangan usia subur, biasa disingkat dengan PUS, adalah pasangan suami isteri yang berumur antara 14 tahun sampai dengan 44 tahun (Usia produktif untuk melahirkan). Pasangan tersebutlah yang menjadi sasaran program Keluarga Berencana.

Pasangan usia subur di Kelurahan Baringin dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4  
Pasangan Usia Subur (PUS)  
(Keadaan Akhir Tahun 1999)

Dusun	Pasangan Usia Subur (PUS)
Dusun I	65
Dusun II	68
Dusun III	59
Dusun IV	20
Jumlah	212

Sumber : Kantor Lurah Baringin

Dilihat dari tabel di atas maka pasangan usia subur terbanyak terdapat pada Dusun II, hal ini sesuai dengan penyebaran jumlah penduduk yang

diuraikan dari tabel sebelumnya dimana jumlah penduduk terbanyak juga terdapat pada Dusun II.

Untuk melihat jumlah peserta KB pada Kelurahan Baringin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5  
Peserta KB Tahun 1999

Dusun	Peserta KB Aktif Menurut Methode				Jlh. Peserta KB Aktif
	PUS	IUD	PIL	SUNT	
Dusun I	65	16	20	26	61
Dusun II	68	15	27	23	63
Dusun III	59	8	29	18	55
Dusun IV	20	3	5	9	17
Jumlah	212	48	80	68	196

Sumber : Kantor Lurah Baringin

### C. Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Baringin dan Uraian Tugas

Bahwa sebagaimana diketahui bahwa Lurah mempunyai kedudukan sebagai Kepala Wilayah yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat Oleh karenanya Lurah sebagai penguasa tunggal di bidang Pemerintahan dan sekaligus sebagai pejabat tertinggi di wilayah kelurahan yang lepas dari persoalan pangkat, yang bertanggung-jawab dan berkewajiban untuk memimpin dan menyelenggarakan pemerintahan

serta membina kehidupan masyarakat dalam segala bidang.

Organisasi Pemerintah Kelurahan Baringin Pola Minimal berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 48 Tahun 1996 adalah terdiri dari :

1. Lurah
2. Sekretariat
3. Urusan Pemerintah
4. Urusan Pembangunan
5. Urusan Keuangan
6. Urusan Kesejahteraan Rakyat
7. Urusan Umum
8. Lingkungan

Adapun pola pembagian tugas di Kantor Kelurahan Baringin adalah sebagai berikut :

1. Lurah

Lurah adalah kepala pemerintah kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada camat.

Lurah mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kelurahan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Lurah mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan keagrarian dan pembinaan politik dalam negeri,
- b. Pembinaan pemerintahan Kelurahan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber  
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/24

- c. Pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.
  - d. Pembinaan pembangunan yang meliputi pembinaan perekonomian, produksi dan distribusi serta pembinaan sosial.
  - e. Penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga.
2. Sekretaris.

Sekretariat adalah unsur staf. Sekretaris dipimpin oleh seorang sekretariat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan dan juga memberikan saran dan pendapat kepada lurah untuk dapat mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur kegiatan sekretariat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, sekretariat mempunyai fungsi :

- a. Merumuskan program kerja.
  - b. Mengadakan kegiatan inventarisasi.
  - c. Melaksanakan administrasi kepegawaian di wilayah.
3. Urusan Umum
- a. Urusan umum mempunyai tugas melaksanakan, menerima dan mengendalikan surat-surat masuk dan keluar serta melaksanakan tata kearsipan.
  - b. Mengkoordinasikan pengetikan surat-surat hasil persidangan dan rapat-rapat atau naskah-naskah lainnya.
  - c. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan

bangunan lain milik kelurahan.

#### 4. Urusan Pemerintahan

Urusan Pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintah kelurahan di bidang penyelenggaraan pemerintahan. Urusan pemerintahan dipimpin oleh seorang Kaur Pemerintahan dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris Lurah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Urusan Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi.
- b. Pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil,
- c. Mencatat kegiatan sosial politik.

#### 5. Urusan keuangan.

Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan lurah dan perangkat kelurahan.

Sedangkan yang menjadi tugasnya adalah :

- a. Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan yang baru.
- b. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan.

#### 6. Urusan pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan

Urusan Pembangunan Masyarakat Desa/Kelurahan mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik, pelayanan umum, perekonomian, produksi dan distribusi serta kesejahteraan sosial.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Urusan pembangunan mempunyai

fungsi :

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area  
Access From (repository.uma.ac.id)7/8/24

- a. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
- b. Melaksanakan pencatatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan.
- c. Menghimpun data potensi serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan.

## 7. Urusan Kesejahteraan Rakyat.

Urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan keadaan kesejahteraan rakyat/masyarakat termasuk bencana alam, bantuan sosial, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, olah raga, pramuka dan lain-lain :

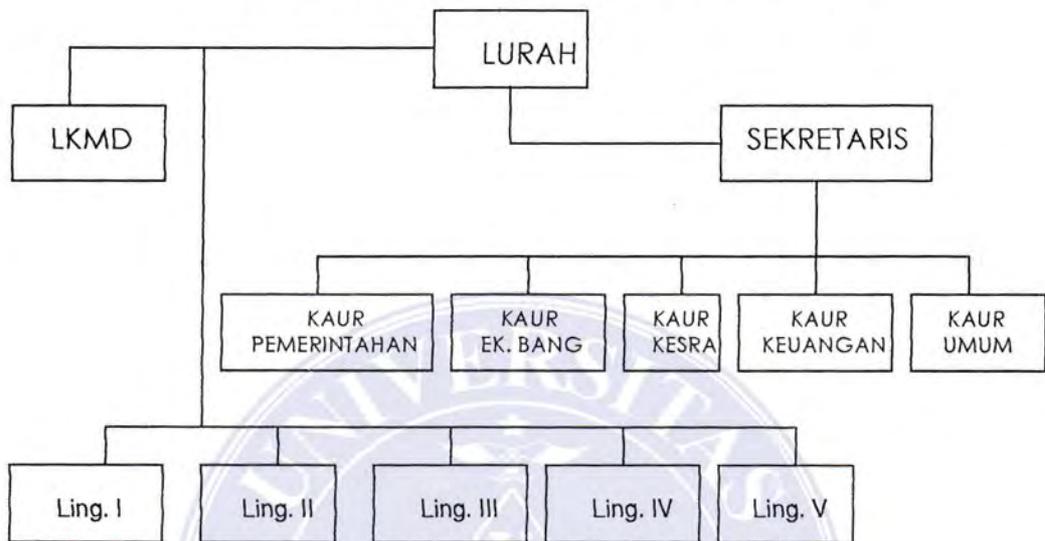
Tugas-tugasnya adalah :

- a. Melaksanakan kegiatan pencatatan bagi para jemaah haji.
- b. Mengikuti perkembangan serta melaporkan keadaan kesehatan masyarakat dan PKK.

Berikut ini untuk melengkapi uraian di atas akan digambarkan struktur organisasi dari Kantor Kelurahan Baringin.

Gambar 1

## Struktur Organisasi Pemerintahan Kelurahan Baringin



Sumber : Kantor Kelurahan Baringin

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan melalui sebaran angket maka didapatkan suatu keadaan terdapat hubungan peranan pemuka agama dengan keberhasilan KB di Kelurahan Baringin Kecamatan Sipirok, dimana dari sebaran angket yang dilakukan maka pada dasarnya kedudukan pemuka agama sangat berperan sekali dalam mensukseskan berjalannya program keluarga berencana, baik itu melalui informasi yang diberikannya maupun melihat keterlibatan pemuka agama itu sendiri di dalam pelaksanaan program keluarga berencana, hal ini dapat dilihat dari jawaban responden pada tabel 20.
2. Pelaksanaan program keluarga berencana tidak dapat dilakukan secara sendiri oleh instansi pemerintahan tetapi harus melibatkan semua unsur yang ada di dalam lokasi kerja pelayanan keluarga berencana baik itu dengan unsur kepala kelurahan setempat maupun dengan pengetua-pengetua adatnya, kaum alim ulama serta orang-orang yang dihormati pada suatu daerah, sebagaimana jawaban responden di dalam tabel 10.
3. Peranan opinion leader baik yang formal maupun yang informal telah berhasil menggerakkan partisipasi masyarakat dalam ber-KB. Ini terbukti dengan ikut sertanya masyarakat dalam menghadiri pertemuan-pertemuan tentang program keluarga berencana yang dicerminkan dari tanggapan responden

yang positif terhadap penyebaran angket yang dilakukan pada tabel 13.

4. Tingkat keterlibatan responden atau masyarakat sebagai objek pelaksanaan program KB dalam berkomunikasi antar personal di dalam pelaksanaan program KB ternyata cukup tinggi. Ini terbukti meningkatnya keberhasilan KB, baik itu dari peningkatan jumlah akseptor maupun juga bertambahnya pengetahuan masyarakat tentang program keluarga berencana itu sendiri hal ini dapat dilihat dalam tabel 22.

## B. Saran

1. Disarankan kepada Pemerintah khususnya lembaga yang mengurus keluarga berencana ini hendaknya dapat lebih meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia penyuluh keluarga berencana ini baik itu sumber daya manusia pengetahuan tentang KB maupun tentang ilmu agama dan juga tradisi suatu masyarakat sehingga penyuluhan yang dilakukannya dapat berdaya guna dan berhasil guna.
2. Bagi masyarakat setempat terutama para pemuka agamanya hendaknya juga dapat memperluas pengetahuannya tidak saja pengetahuan mengenai agama tetapi juga pengetahuan mengenai keduniawiaan sehingga dapat merespon dan mengerti maksud dari program KB ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrah Muslimin, ***Keluarga Berencana (Pantang Berkala) Aspek Masalah Kependudukan***, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1983.
- Charles R. Wright, ***Sosiologi Komunikasi Massa***, Suntingan Jalaluddin Rakhmat, Remaja Karya, Bandung, 1986.
- Cholil Uman, ***Agama Menjawab Tentang Berbagai Masalah Abad Moderen***, Penerbit Sunan Ampel Suci, Surabaya, 1994.
- Edward Depari, ***Peranan Komunikasi Dalam pembangunan***, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1985.
- Evert M. Rogers dan F. Floyd Shomaker, ***Memasyarakatkan Ide-Ide Baru***, terjemahan Abdillah Hanafi, Usaha Nasional, Surabaya, 1982.
- H. Chuzaimah T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, ***Problematika Hukum Islam Kontemporer***, Penerbit Pustaka Firdaus, 1994, Jakarta.
- Jalaluddin Rakhmat, ***Metode Penelitian Komunikasi***, Remaja Karya, Bandung, 1989.
- Kartini Kartono, ***Pengantar Metodologi Research Sosial***, Alumni, Bandung, 1980.
- Mahjuddin, ***Masailul Fiqhiyah, Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini***, Penerbit Kalam Mulia, Jakarta, 1992.
- Oemi Abdurachman, ***Dasar-Dasar Public Relation***, Alumni, Bandung, 1989.
- Onong U. Effendy, ***Dimensi-Dimensi Komunikasi***, Alumni, Bandung, 1986.
- \_\_\_\_\_, ***Komunikasi dan Modernisasi***, Alumni, Bandung, 1970.

\_\_\_\_\_, **Radio, Siaran, Teori dan Praktek**, Alumni, Bandung, 1983.

\_\_\_\_\_, **Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek**, Remaja Karya, Bandung, 1984.

Soekartawi, **Prinsip Dasar Komunikasi Pertanian**, UI. Press, Jakarta, 1988, .

Winardi, **Pemimpin dan Kepemimpinan Dalam Management**, Alumni, Bandung, 1983.

Winarno Surakhmad, **Pengantar Penelitian Ilmiah**, Tarsito, Bandung, 1980.

